

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah terbukti berkontribusi signifikan mendorong dan merangsang tingkat pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan, UMKM memiliki pengaruh yang cukup besar seperti penciptaan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja dan yang paling utama menjadi penopang saat terjadinya krisis ekonomi. Di Dunia saat ini telah di hebohkan oleh adanya Virus Corona (Covid-19), wabah ini menimbulkan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia bahkan Negara-negara di Dunia. Virus Corona ini, menimbulkan dampak yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia seperti adanya krisis ekonomi dan perekonomian menjadi tidak stabil. Salah satu teknik untuk meningkatkan dan mendorong kesejahteraan masyarakat saat ini yaitu dengan melakukan suatu wirausaha. Saat ini, keberadaan UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan sekaligus membantu pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran yang ada saat ini. Dengan berwirausaha akan membuat masyarakat menjadi lebih mandiri, membuat peluang bagi suatu individu dan menarik suatu *value* atau keuntungan dari peluang yang diciptakanya tersebut.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2016:1) UMKM merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan yang memenuhi kriteria serta definisi usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 yang berlaku di Indonesia. Kriteria UMKM dalam Undang-

Undang No. 20 Tahun 2008 yaitu: Usaha Mikro memiliki asset maksimal Rp50.000.000 dan omzet maksimal Rp300.000.000, Usaha Kecil memiliki asset lebih dari Rp50.000.000- Rp500.000.000 dan omzet lebih dari Rp300.000.000 - Rp2.500.000.000, Usaha Menengah memiliki asset lebih dari Rp500.000.000 - Rp10.000.000.000 dan omzet lebih dari Rp2.500.000.000 - Rp50.000.000.000. Aktivitas UMKM tidak akan jauh terlepas dari kegiatan akuntansi yang sangat memiliki peran penting untuk menunjukkan perkembangan usaha atau kondisi keuangan sehingga keberlangsungan hidup usaha dapat terekam dan dapat dijadikan bahan untuk dapat di evaluasi.

Tabel 1.1

KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

NO	USAHA	KRITERIA	
		ASET	OMZET
1	Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
2	Usaha Kecil	50 juta - 500 juta	300 juta - 2,5 milyar
3	Usaha Menengah	500 juta - 10 milyar	2,5 milyar - 50 milyar

(Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008).

Provinsi Bali memiliki luas wilayah 5. 636.66 km atau 0,29% dari luas wilayah Indonesia, yang terdiri dari sembilan Kabupaten/Kota, diantaranya: Kabupaten Gianyar, Bangli, Tabanan, Karangasem, Klungkung, Jembrana, Badung, Denpasar dan Buleleng. Menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali per 10 Agustus 2020, jumlah UMKM di Provinsi Bali 326. 009 UMKM yang tersebar secara tidak merata di seluruh Kabupaten dan Kota di pulau Bali, yaitu Kabupaten Gianyar dengan jumlah (75.412 Usaha), Bangli (44.068),

Tabanan (41.459), Karangasem (39.589), Klungkung (11.761), Jembrana (27.654), Badung (19.688), Denpasar (31.826) dan Buleleng sejumlah (34.552 Usaha). Dari banyaknya UMKM yang ada di Provinsi Bali, terdapat beberapa kendala yaitu kendala yang sering dihadapi UMKM dalam memperoleh pinjaman kredit untuk mencukupi kebutuhan dana usaha adalah sulitnya persyaratan yang diberikan oleh pemberi kredit yaitu lembaga perbankan, dimana salah satu syaratnya adalah laporan keuangan UMKM yang dapat mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Tetapi, pada kenyataannya banyak pelaku UMKM yang tidak menyusun atau membuat laporan keuangan dalam kegiatan usahanya (Widyawati, 2020:5).

Menurut Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali mencatat jumlah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Pulau Dewata hingga triwulan I-2021 sudah mencapai Rp1,6 triliun pada 32.673 debitur. Kredit UMKM terbesar berada di kota Denpasar dengan pangsa 31,78 % kemudian, diikuti dengan Kabupaten Badung dengan pangsa 16,88% dan Gianyar 11,61%. Dan di Kabupaten Karangasem jumlah kredit sebanyak 14.410 UMKM.

Tabel 1.2
Data Jumlah Kredit Provinsi Bali 2021 Pada Triwulan Pertama
(Tiga Rerking Teratas dan Tiga Terbawah)

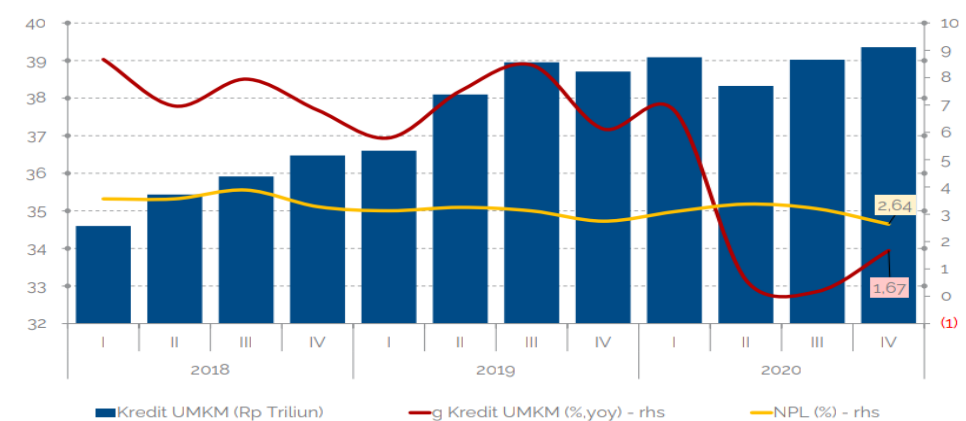
No	Kabupaten/Kota	Persentase (%)
1	Denpasar	31,78%
2	Badung	16,88%
3	Gianyar	11,61%
4	Karangasem	5.35%
5	Bangli	4,15%

6	Klungkung	4,05%
---	-----------	-------

(Sumber: Laporan Perekonomian Provinsi Bali, 2021)

Kabupaten karangasem, Bangli dan Klungkung memiliki jumlah kredit dengan persentase atau ranking tiga terendah. Menurut DJPb (2021), jumlah kredit rendah di tiga kabupaten tersebut disebabkan oleh banyaknya pemilik UMKM yang tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku. Agar dapat mempercepat mengakses kredit Bank dengan mudah, tentunya UMKM harus membuat laporan keuangan sesuai dengan standar dan berkualitas. Tetapi, keadaan di lapangan mempresentasikan sebagian besar pelaku Usaha tidak membuat laporan keuangan, sehingga pemberi kredit sangat memperhatikan segala aspek dalam memberikan pinjaman modal.

Gambar 1.1 Perkembangan Kredit UMKM Provinsi Bali



(Sumber: Laporan Perekonomian Provinsi Bali, 2021)

Risiko Kredit UMKM pada TRIwulan Pertama 2021 masih terjaga, baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 2020 maupun dibandingkan dengan tahun 2019. Meskipun kredit UMKM tumbuh melambat. Namun, kualitas kredit masih terjaga. NPL kredit UMKM pada triwulan pertama 2021 tercatat sebesar (2,64%) membaik dibandingkan dengan triwulan lalu 2020 yaitu (3,20%) maupun

pada tahun 2019 (2,75%) dan masih terjaga di bawah 5 %. Terjaganya risiko kredit UMKM di tengah penurunan kinerja UMKM dipengaruhi oleh kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan dampak sosial dan ekonomi dari Covid-19. Kebijakan-kebijakan tersebut berhasil menahan peningkatan NPL kredit pada UMKM di Provinsi Bali.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyadari perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi perekonomian nasional harus didukung akses keuangan yang baik agar UMKM tersebut semakin berkembang. Kurangnya akses keuangan dan paham *finnacial* yang rendah menghambat perkembangan UMKM di Indonesia. Pemerintah saat ini berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan menetapkan sebuah peraturan yang mewajibkan UMKM untuk melakukan pembukuan atau pencatatan akuntansi yang baik yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam pasal 48 menyatakan pembinaan dan pengawasan UMKM yang telah memperoleh izin usaha dilakukan oleh pejabat secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, pada pasal 49 ditegaskan dalam rangka pembinaan serta pengawasan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, pemegang izin usaha wajib menyusun pembukuan kegiatan usahanya. Wahyu, (2017: 3) menyatakan bahwa saat ini sebagian UMKM telah memulai menyusun laporan keuangan meskipun terbatas untuk memenuhi persyaratan kredit ataupun dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Pembuatan laporan keuangan sendiri memerlukan pengetahuan dan keterampilan

mengenai akuntansi. Hal ini masih sangat sulit dilakukan karena keterbatasan pemahaman akuntansi pelaku UMKM, rumitnya proses pencatatan akuntansi dan anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting bagi UMKM.

Menurut Eny Suatini, (2018:168) Pencatatan akuntansi harus sesuai dengan setiap terjadinya transaksi, dalam penyusunan laporan keuangan UMKM masih mengalami kendala. Mereka berpikir bahwa menyusun laporan keuangan adalah hal yang rumit dan perlu pemahaman dan bantuan dalam proses penyusunan laporan keuangan, setiap usaha memiliki laporan keuangan tersendiri untuk menganalisis posisi keuangan dan kinerja usahanya, posisi keuangan yang baik haruslah mengikuti standar yang berlaku sesuai dengan jenis usahanya. Di samping itu, kompetisi pada dunia usaha atau bisnis semakin berkembang dan meningkat sejalan dengan semakin maraknya perkembangan UMKM. Dengan semakin pesatnya persaingan atau kompetisi tersebut, pendapatan yang dihasilkan oleh suatu usaha akan menginformasikan bahwa jumlah beban dalam proses produksi usaha akan ada kecenderungan memiliki nilai yang sama dengan total pendapatan yang diterima dari usaha. Sesuai dengan keadaan tersebut, usaha dengan kriteria industri kecil jika tidak memiliki kemampuan bersaing dengan usaha lainnya akan kalah dalam persaingan. Berdasarkan hal tersebut, untuk dapat memajukan dan menjadikan UMKM lebih mandiri maka pada tanggal 18 Mei 2016 dilaksanakan rapat serta disahkanlah ED SAK EMKM (*Exposure Draft* Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah). Pada tanggal 24 Oktober 2016, standar tersebut ditetapkan menjadi SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah). Dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, DSAK IAI mempertimbangkan

karakteristik UMKM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dan SAK EMKM diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Januari 2018. Menurut IAI (2016) Penerapan SAK EMKM ini perlu di laksanakan, agar lebih mudah dalam klasifikasi atau membedakan yang mana termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan pasal 6 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM. Penerbitan SAK EMKM ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong literasi keuangan bagi pelaku UMKM sehingga dapat memperoleh akses pendanaan melalui perbankan ataupun dapat melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan kewajibannya (Darmasari, 2020: 137).

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI menilai keberadaan UMKM di Pulau Bali berkembang pesat dan sangat maju. Kemenkiminfo menilai perkembangan itu terjadi karena masyarakat Bali sangat inovatif dan berkreatifitas tinggi. Sehingga, sesuatu yang tidak bernilai bisa saja menjadi sebuah karya seni. Namun, tingginya potensi UMKM dalam perkembangan perekonomian tidak diimbangi dengan kualitas UMKM, hal ini terbukti bahwa pencatatan dan pengelolaan keuangan yang merupakan salah satu keberhasilan UMKM belum dilakukan secara optimal. Permasalahan yang paling menonjol pada UMKM adalah penyusunan dan pencatatan laporan keuangan yang belum sesuai dengan kriteria. Hal ini disebabkan oleh UMKM terkendala pada beberapa aspek atau faktor yaitu minimnya pengetahuan terkait dengan pencatatan akuntansi. Pelaporan UMKM pada umumnya mencatat jumlah barang yang diterima dan dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli dan dijual, jumlah piutang dan hutang tanpa menggunakan standar akuntansi keuangan yang ada, hal tersebut

tidak menjelaskan informasi keuangan yang sesungguhnya (Rahmanti, dkk. 2019:25).

Di Provinsi Bali telah banyak berkembang UMKM yang tersebar di setiap Kabupaten. Terdapat sembilan Kabupaten yang terdapat di Provinsi Bali yaitu: Kabupaten Gianyar, Bangli, Tabanan, Karangasem, Klungkung, Jembrana, Badung, Denpasar dan Buleleng. Penelitian ini berfokus pada UMKM yang berada di wilayah Kabupaten Karangasem, berikut adalah data jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Karangasem:

TABEL 1.2
DATA JUMLAH UMKM YANG TERIDENTIFIKASI PADA KABUPATEN
KARANGASEM PER 2020-2021

No.	Kecamatan	Jumlah UMKM 2016	Jumlah UMKM 2017	Jumlah UMKM 2020	Jumlah UMKM Feb, 2021
1	Abang	3.091	3.245	6.452	6.452
2	Kubu	3.076	3.330	8.704	8.704
3	Karangasem	6.208	6.781	11.320	11.320
4	Bebandem	2.735	2.894	6.245	6.245
5	Selat	3.259	3.314	7.208	7.208
6	Rendang	2.371	2.809	5.111	5.111
7	Sidemen	4.356	4.404	6.525	6.525
8	Manggis	2.616	3.262	5.888	5.888
Jumlah		27.712	30.099	57.453	57.453

(Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Karangasem, 2021)

Karangasem merupakan salah satu Kabupaten yang banyak memiliki tempat pariwisata di Bali, seperti: Taman Edlwis, Taman Ujung, Pura Lempuyang Luhur, Tirta Gangga, dan yang paling terkenal di seluruh dunia yaitu *Mother Temple of Bali* (Pura Besakih). Dengan adanya tempat wisata rekreasi dan objek wisata spiritual memberikan dampak yang sangat baik bagi masyarakat, seperti: masyarakat termotivasi untuk menjadi seorang wirausaha, menambah lapangan pekerjaan dan menambah pendapatan masyarakat dari aktivitas usahanya. Karangasem sendiri memiliki delapan Kecamatan diantaranya: Kecamatan Abang, Kubu, Karangasem, Bebandem, Selat, Rendang, Sidemen, dan Manggis. Dari data di atas menunjukkan bahwa perkembangan UMKM di Kabupaten Karangasem sangat pesat, jumlah UMKM pada tahun 2016 yang teridentifikasi pada Kabupaten Karangasem sebesar 27.712 dan di tahun 2017 sebesar 30.099 UMKM. Berdasarkan data dari Diskop dan UMKM Provinsi Bali pada bulan Februari 2021, jumlah UMKM yang teridentifikasi di Kabupaten Karangasem sebesar 57.453 UMKM. Dari 57.453 unit UMKM yang ada saat ini, terdapat beberapa kasus dan fenomena berdasarkan *survey* dan wawancara yang dilakukan peneliti pada beberapa UMKM di Kecamatan Bebandem, Kubu dan Abang mengenai SAK EMKM dalam penyusunan penyusunan laporan keuangan. Pertama, masih banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki pemahaman akuntansi dan belum menyadari pentingnya pencatatan keuangan. Kedua, banyak UMKM yang tidak memiliki izin usaha dan pembukuan keuangan, padahal Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karangasem menghimbau bahwa proses pengurusan surat izin usaha sangatlah mudah. Ketiga, kebanyakan pelaku UMKM

menganggap usaha yang mereka jalankan masih kecil atau belum berkembang sehingga mereka menganggap bahwa penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK yang berlaku tidak perlu dilakukan atau diterapkan.

Menurut Ismadewi, dkk. (2017: 3) SAK EMKM ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan atau berdasarkan perundang-undangan. SAK EMKM lebih mudah dipahami oleh pengusaha dan disesuaikan dengan kebutuhan usaha pengusaha sehingga dapat mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya pada usahanya dan dapat mengukur kinerja usahanya tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku UMKM enggan dalam penerapan SAK tersebut, yaitu: Menurut Lohanda (2017:5) Tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan juga mempengaruhi keberhasilan UMKM. Pelaku UMKM yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi akan mampu membawa UMKM menuju kemajuan yang lebih baik. Namun, bukan berarti pelaku UMKM yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah tidak bisa maju, hanya saja tingkat kemajuannya akan lebih cepat jika memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi dan memiliki kemampuan dalam pengelolaan usaha.

Menurut (Janrosl. 2018: 7) Sosialisasi SAK EMKM merupakan suatu proses dalam belajar agar bisa mengkoordinasikan perilaku individu dengan perilaku orang lain serta belajar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan serta belajar berdasarkan aturan yang berlaku pada SAK EMKM. Tidak adanya sosialisasi tentang SAK EMKM yang menyebabkan pelaku UMKM tidak mengetahui maksud dan tujuan dari penerapan standar tersebut. Selanjutnya, Umur usaha merupakan berapa lama waktu hidup atau ada suatu organisasi tersebut dan juga

memiliki keuntungan atau kerugian. Umur usaha sangat mempengaruhi sistem informasi akuntansi (SIA), semakin lama usaha itu berdiri maka semakin tinggi penggunaan sistem informasi akuntansinya, sebaliknya semakin rendah umur usaha maka sistem Informasi akuntansi (SIA) juga semakin rendah (Riska, 2020:22).

Pengalaman kerja menurut Menurut Arianti (2020: 292) merupakan suatu waktu atau lamanya bekerja seseorang individu agar menjadi pribadi yang lebih baik dengan pengalaman yang dimilikinya dan dapat memberikan kesempatan atau peluang dalam mengembangkan keterampilan yang sangat berharga untuk bekal masa depan. Dengan pengalaman kerja yang dimiliki seseorang di masa lalu, maka akan membuat seseorang tersebut lebih berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan ataupun keputusan dan cenderung mematuhi semua kebijakan atau aturan-aturan yang berlaku, khususnya dalam pelaporan keuangan UMKM.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agus Pradita (2019) menunjukkan bahwa pencatatan laporan keuangan pelaku UMKM masih dilakukan secara sederhana, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan atau pemahaman mengenai akuntansi dan tidak adanya pemisahan antara keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan. Hal serupa juga dinyatakan (Falah Rafiq, 2018) pelaku UMKM masih kurang memahami tentang akuntansi secara keseluruhan, hanya mengetahui dasar-dasar akuntansinya saja. Sedangkan, sosialisasi SAK EMKM masih sangat sedikit sekali sehingga pelaku UMKM masih belum paham terhadap perlakuan akuntansinya. Dan pencatatan laporan keuangan pelaku umkm masih dilakukan secara sederhana.

Dewi (2019: 143) Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam kesiapan

UMKM dalam penerapan SAK EMKM adalah kesadaran akan pentingnya laporan keuangan belum dimiliki oleh pelaku UMKM, tidak adanya sosialisasi dan pelatihan tentang SAK EMKM serta pengetahuan yang dimiliki masih sangat minim. Sedangkan, (Darmasari, 2020: 137), Penyebab pelaku UMKM belum mampu mengimplementasikan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan dikarenakan pelaku UMKM mayoritas belum menyadari pentingnya pencatatan keuangan usahanya. Dengan adanya pencatatan keuangan, seperti pembukuan terkait kegiatan operasional usahanya, pelaku UMKM akan dapat melihat perkembangan usahanya tersebut apakah laba atau rugi. Pelaku UMKM mayoritas masih belum memahami tentang akuntansi dan beranggapan bahwa akuntansi itu sangatlah rumit.

Dalam penelitian ini, menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) sebagai dasar penelitian. *Theory of Planned Behavior* merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (Teori tindakan beralasan) yang dikemukakan oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein. *Theory of Reasoned Action* dikembangkan oleh Icek Ajzen menjadi *Theory of Planned Behavior*. Teori menyatakan bahwa perilaku seseorang akan muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Niat seseorang untuk berperilaku dapat diprediksi dengan tiga hal yaitu: *Attitude Toward the Behavior* (Sikap terhadap perilaku), *Subjective Norm* (Norma subyektif), serta *Perceived Behavioral Control* (Persepsi pengendalian diri). *Attitude Toward the Behavior* merupakan keseluruhan evaluasi seseorang mengenai positif atau negatifnya untuk menampilkan suatu perilaku tertentu. *Subjective Norm* merupakan kepercayaan seseorang mengenai tuntutan dari orang lain yang dianggap penting baginya untuk bersedia menampilkan atau tidak

menampilkan suatu perilaku tertentu sesuai dengan tuntutan. *Perceived Behavioral Control* merupakan persepsi seseorang tentang kemampuannya untuk menampilkan suatu perilaku tertentu (Ajzen, 2005: 117). Hubungan antara *Theory of Planned Behavior* dengan penelitian ini yaitu apabila di dalam diri UMKM sudah timbul niat untuk melakukan suatu pembukuan dalam kegiatan usahanya, dimana niat ini bisa timbul karena adanya beberapa faktor dan peran penting, manfaat serta dampak yang akan diperoleh oleh UMKM apabila melakukan pembukuan. Jika niat sudah timbul dalam diri UMKM kemudian akan ada determinan sikap seseorang terhadap perilaku seseorang tersebut dan akan membuat individu tersebut memiliki keyakinan, sikap dan tindakan untuk melakukan pembukuan sesuai dengan standar yang berlaku yaitu SAK EMKM.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, pada penelitian Darmasari, (2020) yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi SAK EMKM, Pemahaman Akuntansi, dan Tingkat Kesiapan Pelaku UMKM Terhadap Implementasi SAK EMKM di Kabupaten Buleleng, yaitu terletak penambahan dan variabel independen yang berbeda yaitu Tingkat Pendidikan, Umur Usaha dan Pengalaman Kerja Pemilik UMKM, kemudian lokasi penelitian yang berbeda yaitu pada UMKM di Kabupaten Karangasem serta pengukuran dan teknik pengambilan sampel yang berbeda.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai penerapan SAK EMKM di Kabupaten Karangasem dengan alasan Menurut data dari Dinas koperasi dan UKM Provinsi Bali pada bulan Februari 2021, jumlah UMKM yang teridentifikasi di Kabupaten Karangasem sebesar 57.453 UMKM. Dengan banyaknya jumlah UMKM di

Kabupaten Karangasem, maka perlu untuk diteliti apakah laporan keuangan UMKM sudah disusun dengan baik dan apa saja yang mempengaruhi pelaporan keuangan pada UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Trisna Dewi (2019), Analisis Penerapan Sistem Pencatatan Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK EMKM pada UMKM Tunjung Biru Desa Tenganan Kabupaten Karangasem, Pelaporan keuangannya masih sangat sederhana dan belum sesuai dengan SAK EMKM. Salah satu asumsi bahwa pelaku UMKM di Kabupaten Karangasem tidak mau atau enggan dalam menerapkan pencatatan keuangan sesuai dengan SAK EMKM karena dianggap rumit dan mereka berasumsi bahwa kegiatan usahanya tidak mau terpotong oleh pajak ataupun berurusan dengan pajak. Sehingga, hal tersebut menyebabkan pelaku UMKM kesulitan mendapat akses permodalan dari Bank dan Subsidi dari Pemerintah karena tidak membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Di samping itu, Pelaporan UMKM di Kabupaten Karangasem hanya mencatat jumlah barang yang diterima dan dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli dan dijual, tidak adanya pemisahan antara uang perusahaan dengan uang pribadi, jumlah piutang dan hutang tanpa menggunakan standar akuntansi keuangan yang ada, hal tersebut tidak mencerminkan informasi keuangan yang sebenarnya. Alasan peneliti menambahkan variabel Pengalaman Kerja, Tingkat Pendidikan dan Umur usaha karena adanya *Research Gap* dari hasil penelitian sebelumnya, variabel pengalaman kerja masih sangat jarang digunakan dalam penerapan SAK EMKM, kemudian, masih adanya keraguan apakah pengalaman kerja, tingkat pendidikan dan umur usaha berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM. Beberapa hasil penelitian terdahulu terkait dengan variabel Pengalaman kerja yaitu: penelitian

yang dilakukan oleh Tambunan (2019) Pengalaman kerja tidak berpengaruh positif terhadap penerapan SAK EMKM, sedangkan menurut Zakiah (2020) berpengaruh positif dan signifikan, kemudian variabel Tingkat Pendidikan yaitu: penelitian yang dilakukan oleh Rizkhi Candra (2019) Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap implementasi SAK EMKM. Berbeda dengan Alfiatun Handayani (2019) Tingkat Pendidikan berpengaruh positif signifikan. Sedangkan, hasil penelitian terdahulu terkait dengan variabel Umur Usaha yaitu: Fany Nurhidayanti (2019) Variabel Umur Usaha berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Implementasi SAK EMKM. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Rias Tuti (2016) Umur Usaha memiliki pengaruh positif signifikan. Berdasarkan penelitian terdahulu, adanya hasil penelitian yang tidak konsisten sehingga penulis tertarik untuk meneliti kembali, dan untuk menguji konsistensi penelitian terdahulu pada daerah yang berbeda sekaligus mewujudkan harapan dan tujuan dari penerbitan SAK EMKM oleh IAI. Melihat permasalahan di atas, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sosialisasi SAK EMKM, Pemahaman Akuntansi, Tingkat Pendidikan, Umur Usaha dan Tingkat Kesiapan Pelaku UMKM Terhadap Penerapan SAK EMKM di Kabupaten Karangasem”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka dapat diidentifikasi masalah, sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan dengan asumsi bawa dianggap sangat rumit dan tidak mau terpotong ataupun berurusan dengan pajak. Pencatatan laporan keuangan UMKM masih sangat

sederhana yaitu hanya mencatat jumlah barang yang diterima dan dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli dan di jual, jumlah hutang dan piutang serta masih adanya penggabungan antara keuangan pribadi dengan hasil oprasional usaha. Dengan membuat laporan keuangan versi dari pelaku UMKM masing-masing mengakibatkan kesulitan mendapatkan Subsidi Pemerintah dan meminjam modal dari Bank dan lembaga keuangan lainnya.

2. Tingkat pendidikan pelaku UMKM yang beragam (SD, SMP, SMA/SMK) menjadi salah satu kendala dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM karena tidak bisa menggunakan teknologi komputerisasi yang berkembang saat ini.
3. Tidak adanya sosialisasi SAK EMKM yang menyebabkan pelaku UMKM tidak membuat pelaporan keuangan sesuai standar, bahkan ada yang sudah sesuai dengan standar tetapi tidak mengetahui tentang SAK EMKM.
4. Keterbatasan modal masih menjadi masalah utama dalam pengembangan usaha jika UMKM menggunakan tenaga kerja ahli akuntansi.

1.3 Pembatasan Masalah

Terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan penerapan SAK EMKM. Pada penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan meneliti tentang Pengaruh Sosialisasi SAK EMKM, Tingkat Pendidikan, Umur Usaha dan Pengalaman Kerja Pemilik UMKM Terhadap Penerapan SAK EMKM di Kabupaten Karangasem. Pelaku UMKM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemilik UMKM (*owner*) atau yang mengelola keuangan UMKM. Pada variabel Umur Usaha berfokus pada perkembangan usaha dari berdiri sampai sekarang. Kemudian, untuk variabel Pengalaman kerja Pemilik

UMKM berfokus pada pengalaman kerja pemilik di masa lalu. Penelitian ini hanya sebatas ruang lingkup penerapan SAK EMKM pada UMKM sesuai dengan *Exposure Draft* SAK EMKM (2016) yang disusun oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi SAK EMKM berpengaruh positif terhadap penerapan SAK-EMKM pada UMKM di kabupaten karangasem?
2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap penerapan SAK-EMKM pada UMKM di kabupaten karangasem?
3. Apakah umur usaha berpengaruh positif terhadap penerapan SAK-EMKM pada UMKM di kabupaten karangasem?
4. Apakah pengalaman kerja pemilik UMKM berpengaruh positif terhadap penerapan SAK-EMKM pada UMKM di kabupaten karangasem?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi SAK EMKM terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Karangasem.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Karangasem.
3. Untuk mengetahui pengaruh umur usaha terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Karangasem.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja pemilik UMKM terhadap

penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Karangasem.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberi manfaat dalam memberi wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang memiliki kaitan dengan penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang dipengaruhi oleh adanya sosialisasi SAK EMKM, tingkat pendidikan, umur usaha, dan pengalaman kerja pemilik UMKM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi dalam praktik pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti hasil dari penelitian ini adalah sebagai sarana pembelajaran terhadap penelitian di bidang ilmiah serta menambah pengetahuan atau wawasan di bidang akuntansi khususnya pelaporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Karangasem.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu penelitian ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi dalam kajian perkuliahan akuntansi terkait dengan penerapan dan pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM.

c. Bagi Pelaku UMKM

Dengan menerapkan SAK EMKM, UMKM dapat memperoleh informasi atas *income*, kewajiban, laba yang lebih akurat dan sistematis. Selain itu, pelaku UMKM lebih mudah untuk menganalisis kinerja usahanya serta mempermudah akses pendanaan dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Kajian Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan ataupun masukan, saran dan dorongan bagi pelaku UMKM agar lebih dapat memahami pentingnya melakukan suatu pencatatan akuntansi sesuai SAK EMKM

